

PANCASILA DAN PRAHARA SISTEM EKONOMI PASAR BEBAS

Dr. Alexander Jebadu¹

Baru seminggu lalu, persisnya tgl 24 September 2016, saya diminta oleh PMKRI Cabang Daerah Tingakt II Kabupaten Sikka untuk menjadi salah seorang pembicara dalam rangka seminar hari ini. Saya diminta untuk memercikkan api diskusi hari ini dengan mempresentasikan tema besar “Pancasila dan Ekonomi Pasar Bebas”. Saya tidak tahu apa yang diharapkan oleh PMKRI dengan tema besar ini. Apakah peserta mau melihat hubungan antara Pancasila dan Ekonomi Pasar bebas? Kalau ya, hubungannya seperti apa? Apakah antara keduanya ada hubungan keluarga?² Atau di antara keduanya ada hubungan simbiosis?³ Jawabannya: tidak.

Sistem Ekonomi Pasar Bebas alias kapitalisme liberal sebaliknya, barangkali tanpa disadari banyak orang, merupakan prahara alias badai yang telah menghempaskan Pancasila. Sistem ekonomi ini telah membuat Pancasila terkapar hidup tanpa kesaktian.⁴ Cita-cita bersama untuk menjadi sebuah bangsa besar, bermartabat, adil, makmur dan sejahtera sejak tahun 1945 seperti yang diusung oleh sila-sila Pancasila dan UUD45 semakin jauh panggang dari api. Pancasila telah lama hanya menjadi hiasan dinding belaka. Idealisme-nya seakan telah menjadi sebuah utopia. Paper ini bertujuan untuk mempresentasikan secara singkat tapi padat cara Indonesia membangun dirinya di segala sektor, khususnya sektor ekonomi, yang sesungguhnya semakin jauh dari kontrak sosial dan politik – Pancasila dan Konstitusi – yang dibangun pada tahun 1945, sistem ekonomi kapitalis liberal alias ekonomi pasar bebas sebagai sebuah neokolonialisme dan apa yang mesti dibuat untuk rebut kembali kedaulatan ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan.

KONTRAK SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK 1945

Tanpa bermaksud terlalu meringkas sejarah panjang dan kompleks dari NKRI, tujuan 200-an suku di Kepulauan Nusantara bersatu membentuk satu bangsa dan satu negara tahun 1945 adalah agar mereka bisa bersatu mempertahankan sumber-sumber ekonomi – hutan, mineral, air, hasil bumi etc – di seluruh wilayah Kepulauan Nusantara, baik di darat maupun di laut, supaya selamanya tidak dieksploitasi lagi oleh bangsa-bangsa lain seperti yang sudah terjadi selama 5

¹ Sebagai dosen di STFK Ledalero, kami mengampu dua dari sekian banyak matakuliah di bawah judul 1) *Politik Ekonomi Pasar Bebas: Neoliberalisme sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba* dan 2) *Politik Pembangunan yang Otentik: Kritik Kenabian Gereja Katolik Terhadap Kekejaman Ekonomi Pasar Bebas Berhukum Rimba* sejak tahun 2014.

² “Hubungan keluarga” itu, misalnya, dalam pengertian bahwa Ekonomi Pasar Bebas merupakan turunan, penjabaran atau implementasi dari nilai-nilai moral, keluarga, persaudaraan, kontrak sosial dan politik dari 200 suku yang menghuni ribuan pulau di seluruh Nusantara.

³ Relasai antara keduanya saling menguntungkan dan menghidupkan: Pancasila dihidupkan, didukung atau diuntungkan oleh Sistem Ekonomi Pasar Bebas dan sebaliknya.

⁴ Sejak tahun 1965, Pancasila dan UUD45 tetap secara publik diklaim sebagai dasar dan panduan bagaimana bangsa ini membentuk pemerintahan negara yang demokratis untuk menjamin kesejahteraan rakyat (welfare state) tapi dalam kenyataannya sudah menyeleweng jauh dari Pancasila dan UUD45. Uraian selanjutnya akan membenarkan hal ini.

abad penjajahan sebelumnya (1510-1945). Pada tahun 1945 suku-suku dari Kepulauan Nusantara bersepakat untuk mempunyai sebuah cita-cita membangun kerjasama untuk mencapai sebuah bangsa yang adil, makmur dan sejahtera baik rohani maupun jasmani seperti yang secara padat dirumuskan di dalam ideologi NKRI yaitu Pancasila. Sehingga dapat dikatakan, Pancasila tidak lain dari siapa, dari mana, bagaimana dan ke mana kita bangsa Indonesia. Ia menjadi intisari dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, tentang asal, eksistensi dan tujuan kita orang Indonesia berbangsa dan bernegara: 1) Bahwa kita adalah makhluk yang mengenal dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai asal dan sumber segala sesuatu termasuk hidup manusia (*Believe in one God*); 2) kita menjadi manusia yang adil dan beradab (*Civilized and just humanity*); 3) untuk mencapai cita-cita bersama pertahankan hak-hak hidup dan sumber-sumber ekonomi serta mencapai tujuan hidup berbangsa dan negara kita perlu bersatu (*the Unity of Indonesia*); 4) kita menanta dan bekerjasama pertahankan hak hidup dan mengejar cita-cita bersama melalui musyawarah perwakilan (*Democracy*) dan 5) kita bercita-cita untuk mencapai keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia (*Social justice for all Indonesian people*).

Untuk mencapai cita-cita dengan proyek besar ini maka diperlukan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan sistem demokrasi, yang pada dasarnya berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang didelegasikan kepada pengurus negara yang dipilih melalui sistem pemilu dan dikelola dengan mekanisme *Trias Politica* – eksekutif, legislatif dan yudikatif – dengan model sentralisasi (1945 -1998) atau desentralisasi (1999 – sekarang).

5 MASALAH SOSIAL EKONOMI YANG MENANTANG INDONESIA (PANCASILA)

Tapi dalam pelaksanaannya selama kurang lebih 71 tahun merdeka sejak tahun 1945, selain membawa sejumlah kemajuan, ada beberapa tantangan berat yang dihadapi Indonesia – yang juga membuat mimpi Pancasila dan UUD45 menjadi semakin jauh dari kenyataan – seperti ketimpangan yang semakin lebar antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin (*inequality between the few rich and majority poor*), urbanisasi (*urbanization*), pelanggaran HAM (*human rights violations*), korupsi yang merajalela (*rampant public corruption*) dan serbuan perusahaan transnasional (*the invasion of transnational corporations*).

1. Jurang semakin lebar antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin

Indonesia dari segi kekayaan alam termasuk negara yang sangat kaya di planet bumi, tapi ironisnya hingga kini ia masih dikategori sebagai negara berkembang alias negara miskin. Sekitar 50% penduduk hidup di bawah US\$2 per hari.⁵ Sebagian besar kekayaan alam mereka di pulau-pulau besar – Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi – sudah dieksploitasi selama berpuluh-puluh tahun bahkan sudah berabad-abad lamanya tapi semuanya ini hanya memperkaya segelintir orang kaya termasuk perusahaan-perusahaan baik nasional maupun transnasional. Sehubungan dengan gap antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin di Indonesia,

⁵ Handayani P.Iin, “Beyond Statistics of Poverty” diterbitkan oleh *The Jakarta Post* online February 13, 2012 in <http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/13/beyondstatistics-poverty.html> (akses 10/6/2013).

Majalah Forbes melaporkan bahwa pada tahun 2013, 25 dari 1.426 billioner dunia adalah orang Indonesia dan jumlahnya menduduki posisi ke 12 di dunia dari jumlah total orang sangat kaya.⁶

2. Urbanisasi dan ketidakadilan regional

Hingga hari ini Indonesia masih dikategorikan sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya masih hidup dari pertanian. Tapi ironisnya, sekitar lebih dari 50% penduduknya hidup di kota (52.5% pada tahun 2015) dibandingkan dengan 26.2% pada tahun 1985, 35.4% tahun 1995 dan 40.7% pada tahun 2000⁷. Menurut Index Mundi, penduduk Indonesia lebih dari 248 juta pada tahun 2013⁸ yang berarti lebih dari dua kali lipat jumlah tahun 1971 (119 juta jiwa).⁹ Selain itu, 60% penduduk Indonesia telah terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luas daratannya hanya 7% dari total seluruh wilayah daratan Indonesia.¹⁰ Selain kesenjangan sosial ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan di Indonesia terjadi antara Jawa dan luar Jawa serta Indonesia bagian barat yang lebih maju dan Indonesia bagian timur yang masih relatif terbelakang. Di Indonesia, Jawa hamper identik dengan kemajuan dan modernitas: Universitas terbaik, Rumah Sakit terlengkap, Gedung Pencakar Langit, Jalan Raya Bebas Hambatan (*Toll* atau *High Way*), Mega Mall etc dan situasi di luar Jawa.

3. Korupsi publik yang merajalela

Masalah yang menantang Indonesia (Pancasila) adalah korupsi publik yang secara konvensional didefinisikan sebagai penyalagunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi.¹¹ Walaupun Indonesia bukan merupakan satu-satunya negara yang korup di dunia, tapi negara ini didaftar sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Pada tahun 1998, tahun kejatuhan regim Suharto, Transparency International's Corruption Perception Index (TPCPI) urutan ke 80 dari 85 negara dengan skor 2.0 dengan skala 0.0 sebagai paling korup dan 10.00 yang paling bersih.¹² Tahun 2014 Indonesia menduduki rangking 107 dari 174 negara dengan skor 3.2.¹³ Menurut Maria Martini, lembaga-lembaga yang diidentifikasi paling korup adalah kepolisian, sistem peradilan, parlemen dan partai-partai politik, birokrasi terutama sektor pertanahan, perizinan,

⁶ Informasi lanjut lihat Kroll Luisa, "Mapping the Wealth of the World's Billionaires" dalam <http://forbes.com/sites/luisakroll/2013/03/09/mapping-the-wealth-of-the-worlds-billionaires/> (akses 7/6/2013)

⁷ Firman Tommy, "Urbanization and urban development patterns" dalam *The Jakarta Post*, 12th of May 2012.

⁸ INDEX Mundi, "Index Indonesia Demographics Profile 2013," in http://www.indexmundi.com/indonesia/demographics_profile.html (akses pada 15/6/2013).

⁹ WIRYONO Bengkulu, "The reason why we should control population growth" in *Jakarta Post*, February 22, 20013

¹⁰ BPS, "Penduduk Indonesia menurut Propinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 & 2010.

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1 (akses 16 / 6 / 2013)

¹¹ MCMILLAN Joanna, "Reformasi [Reformation] and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-corruption Agency Strategy Should Be Reformed to Effectively Combat Public Corruption," in *Emory International Law Review*, Vol. 25, 2011, p.590.

¹² TRANSPARENCY International Corruption Perceptions Index 1998, in http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/1998 (Diakses pada 22/6/2013).

¹³ Transparency International: The Global Coalition against Corruption dalam <https://archive.is/mwxEX> (diases 27 September 2016).

pembangunan infrastruktur, industri pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya.¹⁴ Fenomena lain, kalau selama Orde Baru korupsi yang terpusat pada sekelompok elit di Jakarta – Suharto dan kroni-kroninya – maka di era reformasi ini, sejak tahun 1999 sampai sekarang, korupsi juga sudah ikut terdesentralisasi ke daerah-daerah hingga ke desa-desa.¹⁵

4. Pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela

Walaupun hingga saat ini Indonesia sudah menandatangani 10 dari 14 Instrumen Utama Hak-Hak Universal Manusia yang dikeluarkan oleh PBB, Indonesia tetap dicatat sebagai salah satu pelanggar HAM berat di dunia. Rezim Suharto selama 32 tahun (1965-1998) penuh dengan kekejaman dan pelanggaran HAM di Indonesia.¹⁶ Baik selama Orde Baru maupun selama reformasi ini, pelaku utama pelanggaran HAM di Indonesia adalah pemerintah, aparat militer (polisi dan tentara) dan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang beroperasi di bidang eksploitasi sumber daya mineral. Pelanggaran HAM terutama terutama berhubungan dengan perampasan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di lahan-lahan warga masyarakat. Konflik Aceh, Poso, Sampit, Maluku dan Papua, sekadar menyebut beberapa sebagai contoh, semuanya berhubungan dengan masalah perampasan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan (Hak Ekosob).¹⁷

5. Penyerbuan korporasi transnasional di sektor industri ekstraktif

Sejak reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, masalah terakhir yang juga mendera Indonesia adalah serbuan korporasi transnasional di sektor industri ekstraktif di desa-desa di seluruh Indonesia termasuk NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil namun berpenduduk padat.¹⁸ Setelah meneliti kebijakan pemerintah NTT di bidang industri ekstraktif yang dieksekusi oleh sejumlah besar perusahaan transnasional, kita berargumentasi bahwa industri ini akan memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada antara segelintir orang kaya dan mayoritas

¹⁴ Informasi lengkap tentang ini lihat Martini Maria, “The Causes of Corruption in Indonesia” dalam *Transparency International: The Global Coalition against Corruption*, 7th of August 2012, Number 338, pp.2-3.

¹⁵ Tentang ini bisa baca ¹⁵ RINALDI Taufik, PURNOMO Mariniand DAMAYANTI Dewi, *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah/Fighting Against a Decentralized Corruption in Indonesia: Case Study of Local Government Corruption Handling* (Jakarta: Justice For the Poor Project, 2007).

¹⁶ Informasi rinci, lihat Amnesty International, *Indonesia: Power and Impunity: Human Rights under the New Order*, 1 September 1994, ASA, 21/017/1994, p. 1.

¹⁷ Untuk informasi lebih rinci, lihat UN Human Right Council, *National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 [Universal Periodic Review]: Indonesia* (Geneva: UNHRC Working Group on the Universal Periodic Review, 21 May – 4 June 2012), p. 6 atau SHAH Anup, “Indonesia and Human Rights,” <http://www.globalissues.org/article/140/indonesia-and-human-rights> (diakses pada 15/7/2013) atau FRANCISCAN International & and Asian Human Rights Commission, *Universal Periodic Review (UPR) of the Republic of Indonesia 13th Session (May – June 2012)*, Geneva 2011, pp. 9-10.

¹⁸ Untuk informasi rinci tentang ini, lihat Alex Jebadu (ed.), *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010) atau Ferdi Hasiman, *Monster Tambang: Gerus Ruang Hidup Warga Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: JPIC-OFM Indonesia, 2014).

orang miskin. Industri ini akan memperkaya para elite politik dan perusahaan-perusahaan transnasional dan semakin mempermiskin orang miskin. Karena kerusakan permanen yang ditimbulkannya atas sumber-sumber hidup mereka – tanah pertanian, air minum, polusi sungai dan kepunahan hutan tropis – maka industri ekstraktif ini akan mempermbin mayarakat petani pedesaan dan memperburuk proses urbanisasi. Selain itu, industri ekstraktif ini akan memperburuk baik korupsi publik yang sudah sangat tinggi maupun frekuensi pelanggaran HAM di Indonesia. Seperti sudah ditunjukkan sebelumnya, korupsi publik dan pelanggaran HAM yang merajalela di Indonesia sebagian besar berhubungan dengan eksploitasi tak adil terhadap sumber-sumber daya alam di Indonesia yang saat ini sebahagian terbesar berada di lahan-lahan pertanian milik masyarakat petani pedesaan.

Dan tak pelak lagi, semua pelanggaran ini sekaligus merupakan pelanggaran berat terhadap falsafat Pancasila dan membuat jatidiri bangsa Indonesia yang diusungnya – *people of one God, civilized and just humanity, fraternity due to belonging to one nation, democracy and social justice for every Indonesia* – semakin jauh panggang dari pagi alias semakin jauh dari kenyataan. Maka penolakan terhadap industri dengan segala cara yang luhur merupakan sebuah perjuangan mengembalikan keluhuran Pancasila dan karena karena itu ia merupakan sebuah keharusan.

REZIM EKONOMI NEOLIBERAL DI BALIK KEMELUT EKONOMI & POLITIK

Barangkali tanpa disadari banyak orang, hampir semua krisis sosial ekonomi dan politik di Indonesia seperti yang dipresentasikan di atas tidak bisa dimengerti dengan baik tanpa melihat bingkai penyebabnya yang lebih luas yaitu sistem ekonomi kapitalis liberal atau ekonomi pasar bebas yang sudah sejak lama dipaksakan kepada Indonesia.¹⁹

Sejak Perang Dunia II berakhir hingga sekarang Perdagangan dan pasar bebas internasional telah menjadi instrumen dari negara yang kuat secara ekonomis untuk menguasai negara-negara lain yang kekuatan politik dan ekonominya relatif lemah. Perdagangan dan pasar bebas internasional yang dirancang setelah Perang Dunia II pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan pasar kapitalis (*capitalist market*) untuk berkembang secara global melampaui batas negaranegara industri maju. Sejak akhir Perang Dunia II, dunia pada dasarnya diperintah secara politis dan ekonomis oleh lembaga keuangan yang dalam kenyataan dikontrol oleh sejumlah kecil negara Barat.

¹⁹ Sistem Ekonomi Neoliberal merupakan sebuah tema besar dan sangat complex yang tidak bisa diuraikan dalam satu dua halaman saja di sini. Supaya anda bisa mendapat informasi cukup memadai, baca Awalil Risky & Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkram Indonesia* (Jakarta: E-Publishing Company, 2008); bagaimana negara-negara Barat berusaha menguasai kekayaan alam Indonesia sejak sesudah Perang II tahun 1945 dengan menggulingkan Presiden Sukarno dari kekuasaannya, dengan merancang pemberontakan pemberontak di luar Pulau Jawa seperti Permesta hingga dikudeta secara misterius pada 30 September 1965 dan bagaimana CIA terlibat dalamnya, baca John Roosa, *Pretex for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia* (Wisconsin, USA: The University of Wisconsin Press, 2006) dan bagaimana Sukarno berjuang mempertahankan kekayaan alam Indonesia dari eksploitasi perusahaan asing dan membangun ekonomi Indonesia tanpa bersandar pada pinjaman penuh jebakan dari IMF dan Bank Dunia, baca Franklin B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence* (Ithaca USA and London UK: Cornell University Press, 1976), Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics 1959-1965* (Jakarta & Singapor: Equinox Publishing, 2006) dan Malcolm H. Murfett (ed.), *Cold War Southeast Asia* (Singapore: Marshall Cavendish, 2012).

Ketiga lembaga keuangan yang didirikan tahun 1944 – IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO – merancang dan menjalankan tata ekonomi secara baru untuk seluruh dunia. Tapi dalam rancangan dan pengelolaan IMF dan Bank Dunia, beberapa negara adidaya terutama Amerika Serikat dan Inggris sudah sejak awal berdirinya telah memegang peranan yang sangat dominan dan hal ini terjadi bukan karena dilatarbelakangi motivasi untuk memajukan dunia tapi karena mereka melihat lembaga keuangan ini sebagai instrumen baru untuk kepentingan ekspansi ekonomi mereka pasca Perang Dunia II.²⁰

Dan untuk mencapai maksud ini, maka negara-negara industri mulai menjebak negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk meminjam dana pada Bank Dunia dan IMF pada akhir tahun 1960an hingga 1970-an dalam rangka pembangunan.²¹ Dan ketika negara debitor ini, termasuk Indonesia mulai tak sanggup membayar utang luar negeri dari IMF dan Bank Dunia pada tahun 1980an (khusus negara-negara Amerika Latin) dan pertengahan tahun 1990-an (khusus Asia Timur dan Tenggara termasuk Indonesia yang dilanda krisis ekonomi dan berbuntut dengan lengsernya Suharto tahun 1998), maka negara-negara kreditor/industri via IMF dan Bank Dunia mulai mendikte dan mengatur ekonomi negara-negara debitor dengan memaksa mereka menerima kebijakan ekonomi pasar bebas atau kapitalisme neoliberal.

Kebijakan ekonomi pasar bebas alias kapitalisme neoliberal ini dikenal dengan SAPS *Structural Adjustment Programs* (SAPs), yaitu seperangkat kebijakan dari IMF yang bertujuan untuk menata kembali ekonomi negara-negara miskin yang dibebani utang pada IMF dan Bank Dunia agar ekonomi mereka lebih produktif sehingga keuntungannya bisa dipakai untuk membayar utang luar negeri termasuk utang yang dipinjam pada IMF dan Bank Dunia pada tahun 1960-an hingga 1970-an.²⁴ SAPs itu antara lain meliputi pemotongan belanja publik/pembangunan (*reducing public expenditures*),²⁵ reformasi pajak (*tax reform*), liberalisasi pasar ekonomi (*trade liberalization*) dan ekonomi yang kompetitif (*competitive economy*).²² Melalui kebijakan ini, negaranegara miskin yang berhutang akan bisa mendapat keringanan pembayaran bunga utang lama atau bisa mendapat pinjaman baru dari IMF atau Bank Dunia hanya kalau mereka bersedia menghemat pengeluaran belanja publik, membuka ekonomi negara mereka seluas-luasnya bagi perusahaan asing dan menyerahkan aset-aset publik, yang biasanya sangat vital untuk kepentingan rakyat, untuk dikelola oleh perusahaan swasta termasuk perusahaan swasta dari negara asing.

DAMPAK EKONOMI PASAR BEBAS TERHADAP PANCASILA

²⁰ Richard Peet, *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO* (London and New York: Zed Books, 2010), p. 41.

²¹ Tentang masalah utang luar negeri sebagai jebakan negara-negara industry terhadap negara berkembang termasuk Indonesia, bisa baca Eric Toussain and Damien Millet, *Debt, the IMF dan the World Bank: Sixty Question Sixty Answers* (New York: Monthly Press, 2010), Eric Toussain, *The World Bank: A Critical Primer* (London: Pluto Press).

²² Richard Peet, *Ibid.*, pp. 14-15.

Inti *credo* rezim ekonomi neoliberal, yang dirancang negara-negara industry maju dan dipaksakan kepada negara-negara berkembang melalui SAPs oleh IMF dan Bank Dunia, berkisar pada empat hal pokok: pertumbuhan ekonomi yang tanpa batas (*exponential economic growth*), pasar bebas (*free markets*), liberalisasi ekonomi (*economic globalization* dan privatisasi ekonomi (*economic privatization*).

Dalam lingkaran ideologi ekonomi neoliberal ini, pertumbuhan ekonomi sebuah negara, yang lazimnya diukur dengan Produksi Nasional Bruto (PNB), dilihat sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran hidup manusia (*a path to human progress*). Dan untuk mencapai hal ini, maka pasar dan perdagangan antara bangsa-bangsa harus dibuka seluas-luasnya tanpa dirintangi oleh pelbagai macam regulasi seperti bea cukai terhadap barang impor (*free markets and economic liberalization atau economic globalization*). Negara harus membuka diri seluas-luasnya bagi perusahaan asing. Semua aset vital yang menguasai hidup orang banyak yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan negara (BUMN) harus diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan swasta nasional atau perusahaan transnasional (*economic privatization*) untuk menjamin efisiensi dan kompetisi usaha ekonomi seluas-luasnya.²³

Apakah misi ekonomi neoliberal melalui SAPs telah mencapai tujuan yang diusungnya, yakni meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan kemakmuran negara-negara miskin yang sedang berkembang di seluruh dunia khususnya di belahan bumi Selatan? Kenyataan yang terjadi selama ini menunjukkan jauh panggang dari api. Program restrukturisasi ekonomi (*Structural Adjustment Programs*) yang dipaksakan oleh rezim ekonomi neoliberal melalui IMF dan Bank Dunia kepada negara-negara miskin di seluruh dunia menuai banyak kritik karena dampak negatif yang ditimbulkannya seperti:

1) penghapusan subsidi kebutuhan pokok masyarakat, 2) pengurangan anggaran APBN untuk sektor-sektor sosial (seperti bansos, dana pendidikan, dana bencana alam), 3) penurunan nilai mata uang (devaluasi), 3) pembukaan pasar bebas dengan menghapus bea cukai import, 4) liberalisasi pasar modal, 5) eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dan 5) pencaplokkan kedaulatan negara alias menghancurkan demokrasi – dan untuk Indonesia semua hal ini sama dengan menghancurkan nilai-nilai Pancasila. Cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bertuhan, beradab, satu saudara, kedaulatan tertinggi di tangan dan keadilan sosial menjadi sebuah mimpi nasional yang semakin jauh dari kenyataan.²⁴

TEGAKKAN PANCASILA DENGAN REORIENTASI PEMBANGUNAN

²³ David Korten C., *When Corporations Rule the World* (San Francisco, CA: Berrett-Koeler Publisher Inc., 2009), pp. 72-73.

²⁴ Untuk ulasan agak rinci tentang dampak-dampak negative dari kebijakan ekonomi pasar bebas yang dipaksakan negara-negara industri via IMF dan Bank Dunia ini, bisa baca Alexander Jebadu “Relasi Pertambangan, Kekejaman Neoliberalisme dan Ilusi Pertumbuhan Ekonomi” dalam Richard , *Gereja Itu Politis: Dari Flores untuk Indonesia* (Jakarta: JPIC-OFM Indonesia, 2013), pp. 159-196.

Mengingat kebijakan ekonomi kapitalis neoliberal alias sistem ekonomi pasar bebas merupakan sebuah agenda politik ekonomi dari negara-negara industri dengan mesinnya IMF, Bank Dunia dan WTO dan dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan transnasional milik mereka supaya mereka dengan bebas keluar-masuk untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi negara-negara miskin, maka Sistem Ekonomi Pasar Bebas bukan merupakan sebuah ekonomi yang disambut dengan sukacita. Sukarno selamat 32 tahun ke pemerintahannya telah mengetahuinya sebagai sebuah neokolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru via ekonomi pasar bebas (free market ekonomi). Pengeritik-pengeritik modern seperti Richard Peet, Susan George, Joseph Stiglitz, Eric Trousseau etc juga melabel sistem ekonomi pasar bebas ini sebagai sebuah neokolonialisme.

Dengan melihat isi kebijakan ekonomi neoliberal seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya, ekonomi pasar bebas dengan sendiri bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Sistem ekonomi kapitalis neoliberal akan membuat mimpi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang makmur, adil dan sejahtera seperti yang diusung oleh Pancasila dan UUD45 akan semakin jauh dari kenyataan. Indonesia, negara-negara Asia lainnya, kecuali Jepang dan *the four tigers* (Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan), serta Afrika dan Amerika Latin tampaknya tidak akan bisa berkembang secara fisik seperti yang sudah dicapai bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Utara. Sekalipun seluruh sisa-sisa sumber daya alam di desa-desa di seluruh Indonesia dieksploitasi hingga habis dan hasilnya diekspor untuk melanjutkan pembangunan di negara-negara industri, desa-desa di NTT, di daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia tidak akan berubah menjadi kota metropolitan seperti Paris, London, Frankfurt, Milan, New York atau Hong Kong, Tokyo dan Makau, yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan stasiun kereta api cepat antarkota.

Ini tidak akan terjadi dan akan tetap tinggal sebagai mitos.²⁵ Sebaliknya, orang desa di seluruh Indonesia justru akan menjadi lebih miskin dan hidup lebih sulit. Mereka tetap akan pergi dan pulang dari kebun berjalan kaki sambil mengusung kayu api di kepala. Pada musim paceklik, sebagian dari mereka akan tetap makan biji asam seperti telah terjadi di beberapa tempat di NTT atau umbi beracun di hutan. Tapi itupun kalau perusahaan asing tidak menggusur semua pohon asam dan hutan-hutan yang masih sisa. Propaganda kemakmuran melalui pertumbuhan ekonomi oleh rezim kapitalisme neoliberal yang dieksekusi perusahaan transnasional merupakan sebuah ilusi belaka. Kemakmuran sebagai akibat dari *trickle-down effect* dari sistem ekonomi neoliberal yang dieksekusi korporasai transnasional hanya merupakan sebuah akal-akalan. Karena fakta

²⁵ Menurut Oswaldo de Rivero, mantan diplomat Peru untuk PBB, mengatakan bahwa propaganda pembangunan negara berkembang di Dunia III supaya mereka harus mengejar pembangunan dengan kemajuan Eropa dan Amerika Utara sebagai patokannya merupakan sebuah mitos alias tidak akan bisa menjadi sebuah kenyataan dengan beberapa alasan: 1) Untuk mencapai kemajuan seperti yang telah di raih Eropa dan Amerika Utara dibutuhkan waktu yang panjang (Amerika, misalnya, butuh 500 tahun sejak migrant pertama tiba di sana pada tahun 1500); 2) Untuk mencapai kemajuan dengan standar Eropa dan Amerika Utara dibutuhkan biaya yang tidak sedikit; dan 3) sebahagian besar kekayaan alam planet bumi sudah habis dieksploitasi. Informasi lebih lanjut, lihat Oswaldo de Rivero, *The Myth of Development: The Non-Viable Economies of the 21st Century* (London dan New York: Zed Books, 2001) .

menunjukkan bahwa selama sekitar 30 tahun dunia di bawah kekuasaan ekonomi neoliberal sejak tahun 1980-an, negara-negara berkembang yang dibebani utang termasuk Indonesia semakin miskin, sementara negara-negara industri pengusung sistem ekonomi ini semakin kaya.

Daerah-daerah terpencil Indonesia tidak akan pernah bisa maju secara fisik seperti Eropa dan Amerika Utara atau Jepang. Alasannya jelas. Selain karena usaha pencapaian kemajuan pembangunan fisik dengan standar yang telah diraih bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Utara membutuhkan waktu yang sangat lama, sumber-sumber dasar kekayaan planet bumi secara keseluruhan sudah mulai habis. Minyak bumi sebagai energi utama pembangunan manusia pada abad 20 dan awal abad 21 ini akan habis dalam waktu tak lama lagi. Karena itu, tindakan Pemda di seluruh Indonesia dengan menerbitkan puluhan ribu Isin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menambang pelbagai jenis mineral di daerah-daerah pedesaan di seluruh Indonesia, dengan menghancurkan sawah, ladang dan kebun para petani desa serta hutan lindung di wilayah mereka merupakan sebuah pilihan arah pembangunan yang sangat tidak tepat dan karena itu harus dipertimbangkan kembali. Bersama dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya, pemerintah Indonesia mesti sadar bahwa model ekonomi yang dipaksakan oleh rezim kapitalisme neoliberal, yang dipimpin oleh negara-negara industri G7/8 melalui IMF, Bank Dunia dan WTO serta dieksekusi oleh korporasi transnasional merupakan model pembangunan yang tidak tepat.

Pembangunan hidup dan peradaban manusia tidak bisa ditempuh dengan cara mengeksploitasi alam secara berlebihan (pembangunan yang eksploitatif) dan dengan menggunakan sumber-sumber alam secara berlebihan (gaya hidup konsumtif). Tata ekonomi dunia baru (*New World Economy Order*) yang dirancang di Bretton Woods pada tahun 1944 mesti direvisi kembali secara total. Pertumbuhan ekonomi yang dibingkai pasar dan perdagangan bebas tanpa kendali, yang mendorong eksploitasi alam secara berlebihan dan mendorong budaya konsumtif mesti ditinggalkan. Semua bangsa manusia mesti belajar untuk membangun hidup dan peradabannya selaras dengan kemampuan alam untuk menopang semua unsure kehidupan.

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mesti belajar kembali apa artinya pembangunan manusia (*human progress*) dan bagaimana mereka harus menggapainya secara berkelanjutan (*sustainable*). Tim Jackson ingatkan bahwa kemakmuran sejumlah kecil orang selama ini sesungguhnya diraih dengan menghancurkan alam,²⁶ dan negara-negara berkembang lainnya seharusnya tidak mengikuti jalan keliru yang sama. Tidak semua peradaban yang dicapai bangsa Barat selama ini, misalnya kemajuan fisik dalam bentuk gedung-gedung dan apartmen yang tinggi, jalan raya besar dan rel-rel kereta api yang tembus gunung dan bukit (*tunnel*), budaya hiburan yang kolosal seperti balap mobil dan peragaan busana kecantikan (*beauty show*), dapat menjadi model untuk dikejar.

²⁶ Tim Jackson, *Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet* (London and Washington DC: Earthscan, 2011), p. 15.

Menurut UUD 45 dan Falsafah Pancasila, pembangunan ekonomi dan peradaban Indonesia bersifat holistik – menyeluruh – meliputi badan dan jiwa, rohani dan jasmani. Ia tidak hanya diukur oleh pembangunan fisik tapi juga pembangunan spiritual. Karena manusia pada dasarnya merupakan badan yang menjiwa (*inspired body*) dan sekaligus jiwa yang membadan (*embodied spirit*). Selama manusia hidup, jiwa dan badan begitu satu dan tidak bisa dipisahkan. Dan karena itu pembangunan jasmani dan rohani untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kodratnya demikian mesti berjalan bersamaan dan secara seimbang.

Pembangunan rohani yang umumnya dijalankan oleh lembaga-lembaga agama, entah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha atau Aliran Kepercayaan mesti dihargai dan didukung oleh pemerintah/ negara. Kalau kita yakin bahwa pembangunan spiritual sangat vital bagi kepentingan bangsa seturut Pancasila dan UUD45, maka pembangunan rohani yang dijalankan oleh lembaga-lembaga agama seharusnya dianggarkan juga di dalam APBN/ APBD. Pembangunan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur (Sila Kelima) bersumber pada pengakuan akan Tuhan (Sila Pertama) sebagai asal dan tujuan dari segala sesuatu termasuk bumi dan bangsa Indonesia dan didasarkan pada visi kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila Kedua). Untuk mencapai tujuan ini bangsa Indonesia mesti bersatu sebagai satu bangsa yang bersaudara (Sila Ketiga) apa pun suku, agama, budaya, ras, pulau atau daerahnya dan hidup penuh kasih dalam wadah demokrasi (Sila Keempat) di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, didelegasikan kepada pemerintah untuk dijalankan atas nama rakyat dan bertujuan akhir untuk kepentingan rakyat.

Hingga 19 Januari 2016 total utang luar negeri Indonesia adalah Rp 4.234 triliun (naik dari Rp 1.937 triliun tahun 2012) atau Rp4. 234.000.000.000.000.²⁷ Kalau utang ini dibagi kepada 240.000.000 jiwa penduduk Indonesia, maka setiap warga Indonesia, termasuk yang baru lahir, dibebani utang luar negeri sebesar Rp 17.641.000. Utang ini pasti termasuk utang yang dipinjam dari rezim ekonomi neoliberal melalui IMF dan Bank Dunia pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Bersama dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia seharusnya berani menuntut penghapusan utang ini karena pinjaman tahun-tahun ini dimotivasi politik terselubung dari negara-negara kreditor atau pemegang saham terbesar pada kedua lembaga keuangan di Washington, DC. Lebih dari itu, pinjaman ini tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia karena telah disalahgunakan rezim Orde Baru. Ini jelas merupakan *odious debt*. Ini utang tidak sah, tidak *fair*, dan tidak bermoral. Bangsa Indonesia kini berhak menuntut untuk menghapusnya. Hanya kalau Indonesia menolak membayar *odious debts*, Indonesia akan bebas juga dari resep SAPs atau apa pun namanya yang baru seperti PRSPs (*Poverty Reduction Strategy Papers*) yang dipaksakan oleh rezim ekonomi neoliberal.

²⁷ Diemas Kresna Duta, “Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp4.234 triliun” dalam *CNN Indonesia* online <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160119102118-78-105232/utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp4234-triliun/> (diakses 27 September 2016).

Selain itu, kembalikan dan pertahankan kedaulatan ekonomi seturut UUD 45 Ps. 33. Aset-aset vital yang menguasai hidup rakyat banyak seperti perusahaan air minum, listrik, pelayanan pos, jasa kereta api, penggalian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam, pendidikan dan kesehatan tidak dapat dibenarkan untuk dikelola oleh perusahaan swasta, baik nasional maupun internasional, melainkan mesti dikuasai dan dikelola oleh negara (BUMN) atas nama rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Alasan klasik bahwa BUMN sering tidak efisien dan selalu merugi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjual aset-aset vital negara kepada perusahaan swasta, tetapi dengan memperbaiki sistem, mekanisme serta mental petugas yang menyelenggarakannya.

Demi kedaulatan ekonomi, Indonesia bersama bangsa-bangsa lain mesti berjuang memberantas *tax havens*, kontrol aliran modal dari dalam dan keluar negeri dan tetap berantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Untuk masa depan, Indonesia yang sangat subur karena pupuk alam dari barisan gunung api dari Sabang sampai Merauke bisa membangun atas dasar kekuatan sendiri dengan berbasis pada pertanian, peternakan, dan pengelolaan maritim. Bila uang rakyat yang dikumpul dari pelbagai macam pajak keringat 238.000.000 jiwa penduduk Indonesia (PPh, PPh, PPhnBM, PBB, BPHTB, Meterai, dan lain-lain) dikelola dengan baik, tidak dikorupsi para petugas pajak pada waktu proses pengumpulannya dari tangan rakyat dan tidak dikorupsi lagi oleh pemerintah pada waktu pengalokasiannya via APBN/APBD, Indonesia sebenarnya bisa hidup dan maju hanya dari dan oleh sumber pajak.

Indonesia seharusnya tidak perlu meminjam pada lembaga keuangan luar negeri yang didominasi oleh negara-negara industri sebagai pengusung sistem ekonomi neoliberal yang opresif, eksploitatif, dan konsumeristis. Walaupun Indonesia sekarang dan di masa datang terpaksa harus meminjam pada lembaga keuangan luar negeri, maka pinjaman itu hanya bisa dibuat setelah mendapat persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Ia terlebih dahulu harus terbuka untuk didiskusikan di dalam sidang DPR dan media massa. Alasannya sangat mendasar. Setiap pinjaman luar negeri oleh pemerintah dibuat atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan akan dibayar kembali oleh pajak rakyat. Hanya dengan ini Pancasila bisa ditegakkan kembali dan mimpi kemakmuran yang dicita-citakan bangsa Indonesia bukan merupakan sebuah mitos tapi sebuah kemungkinan yang bisa jadi kenyataan. @ @ @